

## ABSTRAK

Dewasa ini kekerasan yang marak terjadi salah satu di antaranya adalah perbuatan main hakim sendiri. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berperan penting dalam upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri di Polrestabes Semarang dan upaya mengatasinya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder sehingga metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori peran, teori penanggulangan kejahatan dan teori penegakan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adalah melakukan upaya preemtif, preventif dan represif. Upaya preemtif adalah sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat, sedangkan upaya preventif dilakukan dengan kegiatan penyuluhan maupun patroli rutin. Upaya represif merupakan upaya penegakan hukum melalui serangkaian tindakan penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara ke tingkat penuntutan yaitu kejaksaan. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri di Polrestabes Semarang berasal dari internal maupun eksternal. Hambatan internal berupa kurangnya jumlah personel Sattreskrim, adanya kekhawatiran yang dialami oleh aparat kepolisian didalam penegakan hukum dan kesulitan dalam memanggil saksi-saksi. Untuk mengatasi hambatan tersebut dengan penambahan personil dan melakukan koordinasi dengan kepolisian-kepolisian terdekat. Adapun hambatan eksternal adalah berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap perangkat hukum, adanya sifat spontan dari sekelompok masyarakat yang bersumber dari faktor tekanan sosial, tidak adanya peleraian atau pihak yang berusaha menghalangi tindakan main hakim sendiri tersebut. Untuk mengatasi hambatan eksternal membangun kemitraan dengan masyarakat terutama kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum dan kegiatan lainnya yang dapat menciptakan keakraban dan kesadaran hukum masyarakat.

**Kata kunci : penanggulangan, tindakan main hakim sendiri**

## ***ABSTRACT***

Today violence is rampant, one of which is the act of vigilantism. The police as law enforcement officers play an important role in efforts to combat vigilante actions. This study aims to determine the role of Semarang Polrestabes in tackling vigilante actions (eigenrechting) carried out by community groups and to find out the obstacles that arise in overcoming vigilante actions in Semarang Polrestabes and overcoming them.

The approach used is sociological juridical with the specifications of analytical descriptive research. The data used in the form of primary data and secondary data so that the method of data collection through field studies and literature study. The data analysis method used is qualitative analysis. As a knife analysis, role theory and crime prevention theory are used.

The results showed that the role of the Semarang Polrestabes in overcoming the eigenrechting actions carried out by community groups was to conduct pre-emptive, preventive and repressive efforts. Pre-emptive efforts are socialization and approach to the community, while preventive efforts are carried out with regular extension and patrol activities. Repressive efforts are an effort to enforce the law through a series of investigative actions up to the submission of case files to the prosecution level, namely the prosecutor's office. The obstacles that arise in overcoming vigilante actions in Semarang Polrestabes are internal and external. Internal barriers include the number of Satreksim personnel, the concerns experienced by police officers in law enforcement and the difficulty in summoning witnesses. To overcome these obstacles by adding personnel and coordinating with the nearest police forces. The external barriers are in the form of public distrust of the legal instruments, the spontaneous nature of a group of people originating from social pressure factors, the absence of divorces or those who try to block the act of vigilantism. To overcome external barriers, build partnerships with the community, especially to community leaders, religious leaders, youth leaders in the form of legal counseling activities and other activities that can create community familiarity and legal awareness.

**Keywords: countermeasures, vigilant actions**